

PENGARUH KEPATUHAN REKONSILIASI DAN AKURASI INFORMASI PENDAPATAN BELANJA TERHADAP VALIDITAS LAPORAN KEUANGAN

Maria Suryaningsih¹, Ahmad Sulthon HB²

^{1,2} STIE Muhammadiyah Jakarta, mariasuryaningsih1405@gmail.com; iik.haris14@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan rekonsiliasi dan akurasi informasi pendapatan dan belanja terhadap validitas laporan keuangan. Upaya konkrit yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik regresi linier berganda. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah data hasil rekonsiliasi eksternal antara satuan kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN). Populasi dalam penelitian ini sebanyak 581 satuan kerja. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling jenuh dengan data pelaksanaan rekonsiliasi, pagu pendapatan dan belanja, realisasi pendapatan dan belanja, serta data-data terkait profil kualitas laporan keuangan yang meliputi ada tidaknya saldo yang tidak normal, aset belum diregister, dan pagu minus pada masing-masing satuan kerja. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Pengujian hipotesis mendapatkan hasil bahwa kepatuhan rekonsiliasi tidak berpengaruh signifikan terhadap validitas laporan keuangan, dan akurasi informasi pendapatan dan belanja berpengaruh negatif signifikan terhadap validitas laporan keuangan. Kepatuhan rekonsiliasi dan akurasi informasi pendapatan dan belanja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Satuan kerja di kementerian keuangan dapat memperhatikan kepatuhan rekonsiliasi dan akurasi informasi pendapatan dan belanja untuk mendapatkan laporan keuangan yang valid.

Kata Kunci : *validitas, pendapatan, belanja, laporan, rekonsiliasi*

ABSTRACT

This study aims to determine compliance with reconciliation and accuracy of income and expenditure information on the validity of financial statements. Concrete efforts made by the government in realizing transparency and accountability in budget management are by submitting accountability reports in the form of financial reports. The research was conducted using descriptive quantitative methods with multiple linear regression techniques. The population used in this study is data from external reconciliation between work units within the Ministry of Transportation and the State Treasury Service Office (KPPN) as the power of the State General Treasurer (BUN). The population in this study were 581 work units. The sampling technique used is a saturated sampling technique with data on the implementation of reconciliation, income and expenditure ceilings, realization of income and expenditures, as well as data related to the quality profile of financial reports which include the presence or absence of abnormal balances, unregistered assets, and minus ceilings for each unit. The data obtained were analyzed using multiple linear regression. The test shows that the reconciliation suitability has no significant effect on the validity of the financial statements, and the accuracy of income and expenditure information has a significant effect on the validity of the financial statements. Reconciliation compliance and accuracy of income and expenditure information together have a significant

effect on financial statements. Work units in the ministry of finance can pay attention to compliance with reconciliation and accuracy of income and expenditure information to obtain valid financial reports.

Keywords: validity, income, spending, reports, reconciliation

Naskah diterima : 30-10-2021, Naskah dipublikasikan : 30-11-2021

PENDAHULUAN

Perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah oleh Bendahara Umum Negara (BUN) atau Menteri Keuangan diantaranya dilakukan melalui pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan pada seluruh satuan kerja pengelola anggaran. Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data transaksi keuangan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan (*suspen*). Proses ini dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Rekonsiliasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi elektronik rekonsiliasi dan laporan keuangan (*e-Rekon&LK*). Data-data tersebut juga wajib di rekonsiliasi dengan data dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (*SPAN*). Proses rekonsiliasi data dari satuan kerja dengan data *SPAN* dilakukan dengan mengunggah (*upload*) data satuan kerja ke aplikasi agar kualitas dan integritas data menjadi lebih baik.

Satuan kerja masih banyak yang mengabaikan adanya selisih-selisih data pendapatan dan belanja yang direalisasikan dengan *SPAN*, selain itu penyelesaian perbedaan data antara satuan kerja dengan *SPAN* sebagian besar diselesaikan pada akhir tahun anggaran atau mendekati periode pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK-RI. Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan ketidaktepatan keputusan para stakeholder, karena data laporan keuangan yang disampaikan belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Satuan kerja berkewajiban mendokumentasi pelaksanaan anggaran yang berupa data realisasi pendapatan dan belanja yang wajib di rekonsiliasi dengan *SPAN* walaupun masih ditemukan adanya selisih.

Penelitian-penelitian terhadap laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mayoritas berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di luar kepatuhan rekonsiliasi dan informasi pendapatan dan belanja. Penelitian yang dilakukan oleh Herdianto (2015) tentang pengaruh faktor teknis dan organisasional terhadap kualitas Laporan Keuangan menemukan bahwa rekonsiliasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Djunur dan Sani (2019) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyajian saldo akun transaksi antar entitas pada laporan keuangan pemerintah pusat menemukan bahwa penolakan pendapatan dan belanja mempengaruhi pengungkapan saldo akun pada laporan perubahan ekuitas pemerintah pusat. Andirfa et. al. (2016) dan Puspitasari et. al (2016) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah mendapatkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Andriani et. al. (2019) mendapatkan hasil yang berbeda dengan tiga penelitian di atas. Salah satu temuan penelitian tersebut adalah pendapatan asli daerah dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut didukung oleh hasil penelitian Noeiguira dan Jorge (2017) yang menekankan pada bagaimana informasi laporan keuangan pemerintahan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang spesifik terhadap tentang kepatuhan rekonsiliasi dan informasi pendapatan dan belanja pada lingkup pemerintahan mempengaruhi validitas data-data pada laporan keuangan. Penelitian dengan variabel kepatuhan rekonsiliasi, informasi pendapatan dan belanja pada lingkup pemerintahan yang mempengaruhi validitas laporan keuangan di pemerintahan menarik untuk dilakukan agar diperoleh hasil secara empiris.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan rekonsiliasi dan pengaruh akurasi informasi pendapatan dan belanja terhadap validitas laporan keuangan dan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan rekonsiliasi dan akurasi informasi data pendapatan dan belanja secara simultan terhadap validitas laporan keuangan Sehingga dapat digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah adanya informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi validitas laporan keuangan, terutama dari kepatuhan rekonsiliasi dan akurasi informasi pendapatan dan belanja.

KAJIAN LITERATUR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017, dijelaskan bahwa Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan (suspensi) yang dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan.

Undang-Undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. konsep teori keagenan didasari permasalahan keagenan yang muncul ketika pengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Perusahaan merupakan peran yang memberikan kesempatan kepada berbagai partisipan untuk berkontribusi dalam bentuk modal, keahlian serta tenaga kerja dalam rangka memaksimalkan keuntungan jangka panjang dan teori stewardship menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi.

Pada sektor pemerintahan/sektor public hubungan keagenan tersebut juga dapat dilihat dalam penyusunan anggaran (Zelmiyanti, 2016). Pemerintah menyusun anggaran kemudian anggaran tersebut disampaikan kepada DPR sebagai representasi dari perwakilan Rakyat, dimana dalam sistem demokrasi, rakyat adalah *principal* dan pemerintah atau eksekutif adalah agen yang bertanggung jawab terhadap *principal*nya. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di akhir tahun anggaran kepada DPR sebagaimana amanat Undang Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Pelaksanaan anggaran yang dinilai baik oleh DPR akan menjadikan nilai positif bagi pemerintah sebagai Agen, dimana dapat berdampak pada adanya *reward* dari DPR sebagai *principal* kepada pemerintah sebagai agen seperti misalnya dukungan dan persetujuan dari DPR terhadap program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah untuk tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerapan teori *stewardship* ini mendukung terlaksananya reformasi birokrasi pemerintahan yang sedang dilaksanakan. Tujuan akhir dari reformasi birokrasi yang tertuang dalam *grand design* adalah memiliki birokrasi yang bersih dan adanya pelayanan publik yang prima. Pencapaian reformasi birokrasi ini merupakan pelaksanaan *good governance* yang diharapkan dapat tercipta di setiap perusahaan ataupun organisasi yang memiliki ciri *going concern*.

Penelitian Rahmayani (2019), Pinem (2015), dan Herdiyanto (2015) menemukan hasil yang sama, yaitu rekonsiliasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Ketiga penelitian tersebut menjadi dasar perumusan hipotesis pertama, yaitu:

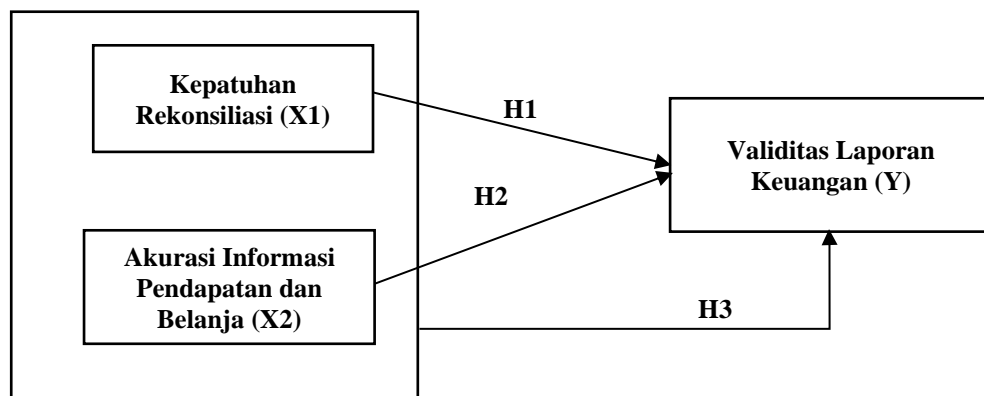
H1 : Kepatuhan Rekonsiliasi Berpengaruh Signifikan terhadap Validitas Laporan Keuangan

Penelitian Djunur dan Sani (2019) menunjukkan bahwa penolakan (selisih) pendapatan/belanja antara SPAN dan Satuan Kerja dapat menyebabkan adanya selisih akun yang diterima dari entitas lain, dan akun ditagihkan ke entitas lain. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi karena kedua akun tersebut merupakan akun antara yang menghubungkan KPPN sebagai Kuasa BUN dengan Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Hal tersebut akan mengurangi validitas laporan keuangan pemerintah pusat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

H2 : Akurasi Informasi Pendapatan dan Belanja Berpengaruh Signifikan Terhadap Validitas Laporan Keuangan.

Pengembangan hipotesis sebelumnya menyatakan bahwa kepatuhan rekonsiliasi dan akurasi informasi pendapatan dan belanja, masing-masing variabel berpengaruh signifikan terhadap validitas laporan keuangan. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3 : Kepatuhan Rekonsiliasi dan Akurasi Informasi Pendapatan dan Belanja Berpengaruh Signifikan Terhadap Validitas Laporan Keuangan



Gambar 1. Kerangka pikir

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Malhotra (2007) merupakan penelitian yang memiliki pernyataan yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi, hipotesis yang spesifik, dan informasi detail yang dibutuhkan. Populasi dalam penelitian ini adalah satuan kerja aktif di lingkungan Kementerian Perhubungan, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013) dengan kriteria sampel adalah satuan kerja dengan realisasi anggaran terbesar. Populasi penelitian sebanyak 581 satuan kerja aktif, menggunakan rumus *Slovin* (Umar, 2005), dengan tingkat keyakinan 95% maka jumlah sampel yang akan diambil adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N \times e^2}$$
$$n = \frac{581}{1 + 581 \times 0,05^2}$$
$$n = 237$$

Sesuai dengan hasil perhitungan, maka sampel yang digunakan sebanyak 237 satuan kerja aktif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku - buku, serta dokumen perusahaan (Sugiyono, 2013). Data sekunder yang digunakan berupa data hasil rekonsiliasi laporan keuangan satuan kerja yang di unggah (*upload*) pada aplikasi *e-Rekon&LK* selama tahun 2020. Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-537/PB/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal tingkat UAKPA dan KPPN Tahun 2020, yang menyatakan bahwa untuk pelaksanaan rekonsiliasi tahun 2020 dimulai untuk periode rekonsiliasi bulan Mei, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rekonsiliasi mulai bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2020.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu melihat data rekonsiliasi satuan kerja pada aplikasi *e-Rekon&LK*.

Dalam penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel dengan rincian sebagai berikut :

1. Variabel Independen.

a. Kepatuhan Rekonsiliasi (X1)

Dalam mengukur variabel Kepatuhan rekonsiliasi Penulis memberikan skor sesuai dengan tahapan rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh satuan kerja, dengan kriteria semakin lengkap tahapan yang dilalui satuan kerja, maka satuan kerja semakin patuh dalam pelaksanaan rekonsiliasi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Gambaran Indikator Variabel Kepatuhan Rekonsiliasi

Variabel	Indikator	Skor
Kepatuhan Rekonsiliasi (X1)	Belum Rekon	1
	Menunggu Satker Upload Ulang	2
	Menunggu TTD KPA	3
	BAR Siap Download	4
	Belum Upload data SIMAK BMN	1
	Upload Data SIMAK BMN Gagal	2
	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	3

b. Akurasi Informasi Pendapatan dan Belanja (X2)

Pengukuran variabel akurasi informasi pendapatan dan belanja menggunakan monitoring informasi keuangan pada aplikasi *e-Rekon&LK* yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya selisih antara pendapatan yang tercatat pada satuan kerja, dengan pendapatan yang tercatat pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Kementerian Keuangan. Informasi yang dibandingkan pada penelitian ini adalah Pagu Belanja, Estimasi Pendapatan, Realisasi Belanja, dan Realisasi Pendapatan dari Satuan Kerja. Setiap informasi satuan kerja yang berbeda

dengan SPAN diberikan skor 0, sementara untuk setiap informasi yang sudah tidak memiliki selisih diberikan skor 1. Rentang skor pada penilaian ini adalah minimal 1 untuk satuan kerja yang seluruh pendapatan dan belanjanya selisih (Pagu Belanja, Estimasi Pendapatan, Realisasi Belanja, dan Realisasi Pendapatan), dan skor 5 untuk satuan kerja yang tidak memiliki selisih data pendapatan dan belanja pada keempat informasi tersebut.

Tabel 2. Gambaran Indikator Variabel Akurasi Informasi Pendapatan dan belanja.

Variabel	Indikator	Selisih	Tidak Selisih
Kepatuhan Rekonsiliasi (X1)	Skor Minimal	1	1
	Selisih Pagu Belanja	0	1
	Selisih Estimasi Pendapatan	0	1
	Selisih Realisasi Belanja	0	1
	Selisih Realisasi Pendapatan	0	1
JUMLAH		1	5

2. Variabel Dependen

a. Validitas Laporan Keuangan.

Pengukuran validitas laporan keuangan aplikasi e-Rekon&LK didasarkan pada kriteria-kriteria berikut :

Tabel 3. Gambaran Indikator Variabel Laporan Keuangan

Variabel	Indikator	Selisih
Validitas Laporan Keuangan (Y)	Skor Minimal	1
	Tidak Ada Saldo Tidak Normal	1
	Tidak Ada Aset Belum Diregister	1
	Tidak Ada Pagu Minus	1
JUMLAH		4

Skor 1 diberikan untuk setiap kriteria yang terpenuhi, dan skor 0 apabila kriteria di atas tidak terpenuhi. Rentang skor pada penilaian ini adalah minimal 1 untuk satuan kerja yang tidak memenuhi ketiga kriteria di atas (Tidak ada Saldo Tidak Normal, Tidak ada Aset Belum Diregister dan Tidak ada Pagu Minus), dan skor 4 untuk satuan kerja yang memenuhi seluruh kriteria tersebut.

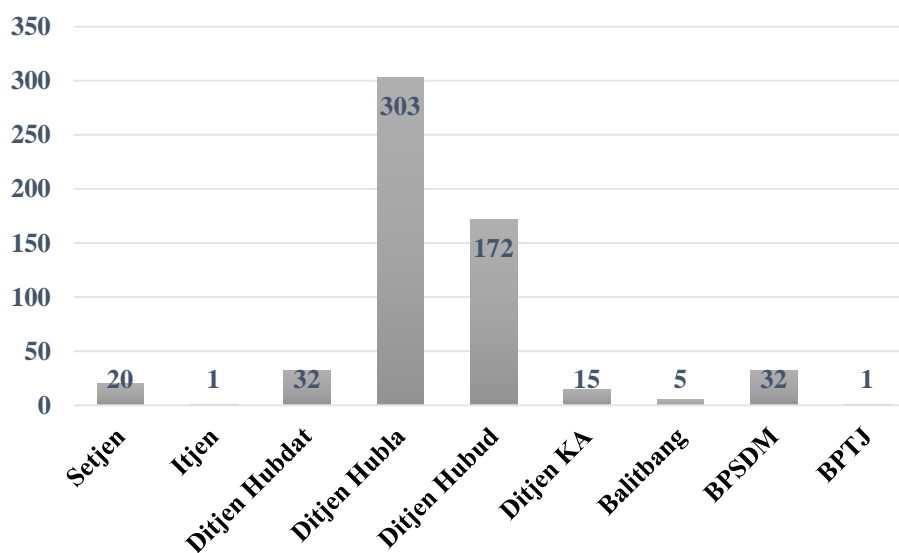
Semua data yang telah diperoleh diberi skor dan dianalisis dengan menggunakan uji statistik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik korelasi dan regresi, yaitu dengan korelasi sederhana untuk menentukan pengaruh parsial masing-masing variabel X terhadap Y, regresi sederhana untuk menentukan kontribusi masing-masing variabel X dengan Y, korelasi ganda untuk menentukan pengaruh simultan variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y, dan regresi ganda untuk menentukan kontribusi variabel X1, X2 secara simultan terhadap variabel Y.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penelitian, didapatkan data jumlah satker yang diteliti per eselon I sebagai berikut :

Tabel 4. Frekuensi Sebaran Unit Kerja

Eselon I	Frekuensi	Presentase
Sekretariat Jenderal	20	3,44%
Inspektorat Jenderal	1	0,17%
Ditjen Perhubungan Darat	32	5,51%
Ditjen Perhubungan Laut	303	52,16%
Ditjen Perhubungan Udara	172	29,60%
Ditjen Perkeretaapian	15	2,58%
Badan Penelitian dan Pengembangan	5	0,86%
Badan Pengembangan SDM	32	5,51%
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	1	0,17%
Jumlah	581	100,00%

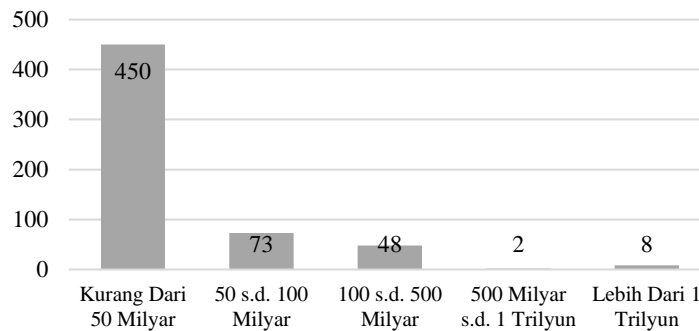


Gambar 2. Histogram Sebaran Unit Kerja

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap unit kerja pada Tabel 4 dan Gambar 2 di atas, diperoleh hasil bahwa dari 581 unit kerja pada Kementerian Perhubungan, sebagian besar berasal dari Ditjen Perhubungan Laut dengan jumlah sebanyak 303 satker atau 52,16%. Selanjutnya adalah yang berasal dari Ditjen Perhubungan Udara yang berjumlah 172 satker atau 29,60% dari total responden, diikuti BPSDM dan Ditjen Perhubungan Darat dengan jumlah masing-masing 32 satker atau 5,51%, dan lainnya berasal dari Eselon I Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal Ditjen Perkeretaapian, Badan Litbang, dan BPTJ.

Tabel 5. Jumlah Satker Berdasarkan Anggaran yang Dikelola

Jumlah Anggaran Dikelola	Jumlah Satker	Presentase
Kurang dari 50 Milyar	450	77,45%
50 s.d. 100 Milyar	73	12,56%
100 s.d. 500 Milyar	48	8,26%
500 Milyar s.d. 1 Triliun	2	0,34%
Lebih dari 1 Triliun	8	1,38%
Jumlah	581	100,00%



Gambar 3. Histogram Jumlah Satker Berdasarkan Anggaran yang Dikelola

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap jumlah satker berdasarkan anggaran yang dikelola pada Tabel 5 dan Gambar 3 di atas, diperoleh hasil bahwa dari 581 unit kerja pada Kementerian Perhubungan, sebagian besar satuan kerja mengelola anggaran kurang dari 50 Milyar yaitu sebanyak 450 satker (77,45%). Sedangkan satuan kerja yang mengelola anggaran di antara 50 Milyar s.d. 100 Milyar terdapat pada 73 Satuan Kerja (12,56%). Selain itu terdapat 8 satker yang mengelola anggaran diatas 1 Trilyun Rupiah.

Deskripsi data hasil penelitian dari ketiga variabel penelitian tersebut ditampilkan dalam tabel dengan parameter rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*), modus, standar deviasi, nilai terendah, nilai tertinggi, dan *range* (selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah), sebagai berikut :

Tabel 6. Data Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

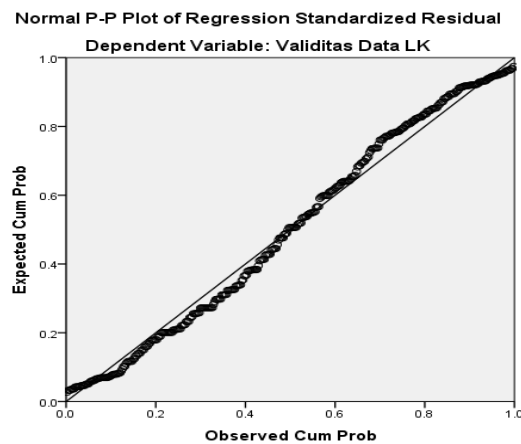
Variabel	N	Min	Max	Rentang	Mean	Median	Modus	Stdev
Kepatuhan Rekonsiliasi	581	43	56	13	54,31	55	56	1,96
Akurasi Informasi Pendapatan dan Belanja	581	19	40	21	34,44	35	37	4,03
Validitas Laporan Keuangan	581	11	32	21	26,64	28	30	4,81
Valid N (listwise)	581							

Sumber: Olah data Spss versi 20

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengecek apakah dalam model regresi, residual memiliki distribusi yang normal. Uji normalitas dapat diuji dengan dua cara yaitu analisis grafik dan analisis statistik (Ghozali, 2011):



Gambar 4. Normal Probability Plot

Berdasarkan gambar 4 di atas, kita dapat melihat bahwa titik – titik plotting yang terdapat pada gambar “ *Normal P-Plot of Regression Standardized Residual*” selalu mengikuti dan mendekati garis diagonal nya. Oleh karena itu, sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas teknik *probability plot*, dapat disimpulkan bahwa nilai residu terdistribusi normal. Dengan demikian maka asumsi normalitas untuk nilai residu dalam analisis regresi linear sederhana dalam penelitian dapat terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode uji korelasi *spearman's rho* dengan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika korelasi antara variabel independen dengan residual di dapat signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Purnomo, 2016). Hasil pengujian menggunakan SPSS mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas *Spearman's rho*

			Correlations		
			Kepatuhan Rekonsiliasi	Akurasi Informasi Pend & Blj	abs_res
Spearman's rho	Kepatuhan Rekonsiliasi	Correlation Coefficient	1.000	.142	-.016
		Sig. (2-tailed)	.	.006	.753
		N	379	379	379
	Akurasi Informasi Pend & Blj	Correlation Coefficient	.142	1.000	.093
		Sig. (2-tailed)	.006	.	.072
		N	379	379	379
	abs_res	Correlation Coefficient	-.016	.093	1.000
		Sig. (2-tailed)	.753	.072	.
		N	379	379	379

Sumber: Olah data Spss versi 20

Bila dilihat dari Tabel 7 bahwa setiap variabel independen memiliki Sig > 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Kriteria pengujian yang digunakan melalui nilai *Tolerance* \geq 0.10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) \leq 10. Hasil yang diperoleh dari penghitungan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a				
	Model	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
	(Constant)	.005		
1	Kepatuhan Rekonsiliasi	.161	.984	1.016
	Akurasi Informasi Pend & Blj	.000	.984	1.016

a. Dependent Variable: Validitas LK

Sumber: Olah data Spss versi 20

Hasil penghitungan sebagaimana Tabel 8 menunjukkan bahwa variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini memiliki $VIF < 10$ atau $Tolerance > 0.10$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

4. Uji Determinasi

Hasil analisis koefisien determinasi memperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 9. Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.286 ^a	.082	.077	.46830

a. Predictors: (Constant), Akurasi Informasi Pend & Blj, Kepatuhan Rekonsiliasi

b. Dependent Variable: Validitas LK

Sumber: Olah data Spss versi 20

Hasil penghitungan koefisien determinasi pada Tabel 9 di atas menunjukkan nilai R Square sebesar 0,082. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel kepatuhan rekonsiliasi dan akurasi informasi pendapatan dan belanja dalam menjelaskan keragaman data variabel Validitas laporan keuangan adalah sebesar 8,2%, sedangkan sisanya sebesar 91,8% dijelaskan oleh variabel lainnya atau adanya *error*.

Uji t

Hasil dari uji t untuk mengukur pengaruh variabel kepatuhan rekonsiliasi dan akurasi informasi pendapatan dan belanja terhadap Validitas laporan keuangan memperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 10. Hasil uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.	KET
	B	Std. Error				
(Constant)	1.893	.665		2.846	.005	
1 Kepatuhan Rekonsiliasi	.017	.012	.070	1.403	.161	Tidak didukung
Akurasi Informasi Pend & Blj	-.036	.006	-.286	-5.752	.000	didukung

a. Dependent Variable: Validitas LK

Sumber: Olah data Spss versi 20

$$VLK = 1,893 + 0,017KR_1 - 0,036AIPB_2 + e$$

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kepatuhan rekonsiliasi memiliki Sig sebesar 0,161 (sig. > 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan rekonsiliasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Validitas laporan keuangan. Sedangkan variabel akurasi informasi pendapatan dan belanja memiliki sig sebesar 0,000 (sig. < 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel akurasi informasi pendapatan dan belanja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap validitas laporan keuangan.

Uji F

Hasil uji F (Anova) untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yang ada (Ghozali, 2016), hasil uji F memperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 11. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.359	2	3.679	16.778	.000 ^b
	Residual	82.460	376	.219		
	Total	89.819	378			

a. Dependent Variable: Validitas LK

b. Predictors: (Constant), Akurasi Informasi Pend & Blj, Kepatuhan Rekonsiliasi

Sumber: Olah data Spss versi 20

Dari Tabel 11 di atas diperoleh nilai Sig. 0,000 (nilai Sig. < 0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara kepatuhan rekonsiliasi dan akurasi informasi pendapatan dan belanja terhadap Validitas laporan keuangan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil perhitungan dengan metode analisis regresi dengan *software* SPSS memperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 12. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics
		B			VIF
1	(Constant)	1.893	2.846	.005	
	Kepatuhan Rekonsiliasi	.017	1.403	.161	1.016
	Akurasi Informasi Pend & Blj	-.036	-5.752	.000	1.016

a. Dependent Variable: Validitas LK

Sumber: Olah data Spss versi 20

Tabel 12 di atas menunjukkan bahwa berdasarkan metode analisis regresi berganda antara kepatuhan rekonsiliasi dan akurasi informasi pendapatan dan belanja terhadap variabel Validitas laporan, model persamaan hubungan yang dibangun adalah :

$$VLK = 1,893 + 0,017KR_1 - 0,036AIPB_2 + e$$

Nilai konstanta sebesar 1,893 menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel kepatuhan rekonsiliasi dan akurasi informasi pendapatan dan belanja maka nilai variabel Validitas laporan keuangan akan sebesar 1,893. Nilai koefisien variabel Akurasi Informasi Pendapatan dan Belanja sebesar -0,036. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel akurasi informasi pendapatan dan belanja memberikan pengaruh negatif terhadap Validitas laporan keuangan, dimana penambahan sebesar satu satuan pada nilai variabel akurasi informasi pendapatan dan belanja akan mengurangi nilai Validitas laporan keuangan sebesar 0,036. Nilai koefisien variabel kepatuhan rekonsiliasi adalah sebesar 0,017, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel kepatuhan rekonsiliasi sebesar satu satuan akan meningkatkan nilai variabel Validitas laporan keuangan sebesar 0,017.

PENUTUP

Simpulan

Variabel kepatuhan rekonsiliasi tidak berpengaruh signifikan terhadap validitas laporan keuangan. Kepatuhan rekonsiliasi menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap validitas laporan keuangan pada satuan kerja dilingkungan Kementerian Perhubungan. Hal tersebut dapat disebabkan karena satuan kerja cenderung mengabaikan validitas dari data-data laporan keuangan yang di upload dalam rangka rekonsiliasi, sekedar untuk menggugurkan kewajiban pelaksanaan rekonsiliasi agar tidak dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan. Selain itu peran kuasa pengguna anggaran (KPA) atau kepala satuan kerja dalam memverifikasi data-data laporan keuangan juga relatif rendah, dimana mayoritas kepala satuan kerja di Kementerian Perhubungan tidak memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan yang cukup memadai.

Variabel Akurasi Informasi Pendapatan dan Belanja berpengaruh negatif signifikan terhadap validitas laporan keuangan. Peningkatan akurasi dari satuan kerja dalam menginformasikan data pendapatan dan belanja justru memiliki hubungan dengan penurunan validitas laporan keuangan. Petugas penyusun laporan keuangan yang tidak memiliki *background* akuntansi dan pelaporan keuangan mengakibatkan adanya kesalahan-kesalahan mendasar yang dapat mengakibatkan berkurangnya validitas laporan keuangan satuan kerja serta kurangnya sumber daya manusia di bidang keuangan pada satuan kerja dilingkungan Kementerian Perhubungan. Sedikitnya pegawai yang menguasai pelaporan keuangan mengakibatkan banyak ditemui kondisi dimana seluruh pekerjaan terkait siklus anggaran mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, penyelesaian tagihan, perbendaharaan, hingga pembukuan dan pelaporan keuangan dikerjakan oleh hanya satu atau dua pegawai saja untuk satu satuan kerja. Beban kerja yang tinggi memaksa pegawai untuk menyusun skala prioritas sesuai dengan kepentingan satuan kerjanya termasuk memilih mana yang harus didahulukan antara akurasi informasi pendapatan dan belanja atau validitas laporan keuangan, karena kedua hal tersebut secara sistem kedua hal tersebut berada pada subsistem yang berbeda.

Secara bersama-sama, kepatuhan rekonsiliasi memiliki pengaruh signifikan terhadap validitas data laporan keuangan. Namun fakta penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan rekonsiliasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan, dan akurasi informasi pendapatan dan belanja yang justru berhubungan negatif dan signifikan terhadap validitas data laporan keuangan. Idealnya setiap variabel dalam penelitian ini saling berkorelasi positif namun dari hasil penelitian

belum menunjukkan hubungan yang ideal sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat dari para pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kualitas dari kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di Kementerian Perhubungan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam rangka mendapatkan data terakhir yang valid, Penulis perlu untuk menunggu hingga proses pemeriksaan BPK selesai dilakukan, atau setidaknya sampai dengan diperolehnya angka Laporan Keuangan Audited Kementerian Perhubungan sehingga tidak ada lagi koreksi-koreksi dari BPK. Penulis hanya meneliti tahun pelaporan 2020 saja. Tahun 2020 terdapat pandemic COVID-19 yang dapat mempengaruhi ritme kerja pemerintahan dimana ada kebijakan work from home, sehingga penulis sedikit mengalami kendala dalam memperoleh data penelitian. Penulis hanya meneliti pengaruh dari dua variabel. Nilai koefisien determinasi yang tidak terlalu tinggi menunjukkan bahwa sebenarnya masih banyak variabel lain yang juga berpengaruh terhadap validitas laporan keuangan namun tidak terdokumentasikan dalam penelitian ini.

Saran

Perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan seperti adanya skema reward and punishment yang lebih komprehensif lagi agar satuan kerja dapat lebih memperhatikan validitas data-data laporan keuangan yang di rekonsiliasikan agar kegiatan rekonsiliasi bukan hanya sekedar dalam rangka menggugurkan kewajiban, namun dapat lebih memberikan manfaat dalam menjaga validitas data laporan keuangan.

Keterbatasan sumber daya manusia dibidang keuangan, baik itu kuantitas dan kualitas perlu untuk disikapi secara serius oleh para pemangku kepentingan. Perlu adanya kualitas rekrutmen, dan pembinaan kompetensi secara berkelanjutan bagi para pegawai yang bertanggungjawab dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

REFERENSI

- Andirfa, M, Basri, H, Shabri, M, dan Majid, A. 2016. "Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh". *Jurnal Administrasi Akuntansi Program Pascasarjana Unsyiah Vol. 5 No. 3*
- Andriani, M, Santi, E, dan Mustika, R. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014-2016. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Politeknik Negeri Padang Vol. 14 No. 1,*
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang Undangan pada Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2018. Jakarta : Pusat Pengelola Data dan Informasi BPK RI*
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2020. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang Undangan pada Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2019. Jakarta : Pusat Pengelola Data dan Informasi BPK RI*
- Berita Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 *Tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga*

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2016. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia
- Ditjen Perbendaharaan. 2019. "Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)". <https://djp.kemenkeu.go.id/direktorat/smi/en/profil/span.html> (Diakses pada 1 Mei 2021)
- Djunur, I. M. dan Sani, G. A. 2019. "Analisis Penyebab Selisih Nilai Transaksi Antar Entitas Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)". *Jurnal Informasi Keuangan dan Akuntansi "INFO ARTHA" Vol 3, No 1, Juli 2019*. PKN STAN Press
- Herdiyanto, Deni 2014. "Pengaruh Faktor Teknis Dan Organisasional Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia)". *Accounting and Business Information Systems Journal Vol 2, No 1 (2014)*. Universitas Gadjah Mada
- Kemendikbud RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (Diakses 22 Mei 2021)
- Herdiyanto, D. (2015). *Pengaruh Faktor Teknis dan Organisasional Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia)*. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 4(2)
- Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Noiguera, S. P. S, Jorge, S. M. F, dan Oliver, M. C. 2013. "The Usefulness of Financial Reporting for Internal Decision-Making in Portuguese Municipalities". *Management Research: The Journal of the Iberoamerican Academy of Management Vol. 11 No. 2, 2013*
- Pinem, H. F. 2015. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN Medan II)". *Tesis. Magister Akuntansi Universitas Sumatera Utara*
- Puspitasari, N. L. P. L, Adiputra, I. M. P, dan Sulindawati, N. L. G. E. 2015. "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha Vol. 3 No. 1*
- Rahmayani, Siti. 2018. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Rekonsiliasi Data Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Kementerian Agama Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tebing Tinggi". *Tesis. Magister Ilmu Akuntansi Universitas Sumatera Utara*
- Suryaningsih, Maria dan Maruf Hidayat "PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN " *Jurnal Akrab Juara: Vol 5 No 3,2020*
- Zelmiyanti, Ririn. 2016. *Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia)*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi Vol 7 No 1, Universitas Islam 45*.
- _____, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- _____, *undang-undang nomor 18 tahun 2016 terkait APBN tahun anggaran 2017*
- _____, *undang-undang nomor 15 tahun 2017 terkait APBN tahun anggaran 2018*

- _____. *undang-undang nomor 12 tahun 2018 terkait APBN tahun anggaran 2019*
- _____. *undang-undang nomor 20 tahun 2019 terkait APBN tahun anggaran 2020*
- _____. 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern pada Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2018*. Jakarta : Pusat Pengelola Data dan Informasi BPK RI
- _____. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program. IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- _____. 2017. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang Undangan pada Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2016*. Jakarta : Pusat Pengelola Data dan Informasi BPK RI
- _____. 2017. *Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern pada Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2016*. Jakarta : Pusat Pengelola Data dan Informasi BPK RI
- _____. 2018. *Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern pada Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2017*. Jakarta : Pusat Pengelola Data dan Informasi BPK RI
- _____. 2018. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang Undangan pada Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2017*. Jakarta : Pusat Pengelola Data dan Informasi BPK RI
- _____. 2021. "Sosialisasi SAKTI Web Full Modul". <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/semarang2/id/data-publikasi/berita-dan-artikel/2979-sosialisasi-sakti-web-full-modul.html> (Diakses pada 1 Mei 2021)